



Katalog: 1205057



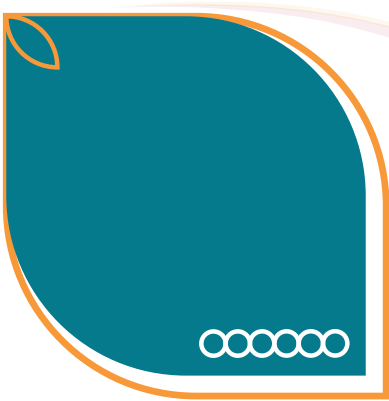
CERITA DATA STATISTIK UNTUK INDONESIA

Volume 2, Nomor 7, 2025

*Memilih Masa Depan: Faktor Penentu
Preferensi Sekolah Negeri vs Swasta*



BADAN PUSAT STATISTIK



CERITA DATA STATISTIK UNTUK INDONESIA

Volume 2, Nomor 7, 2025

MEMILIH MASA DEPAN: FAKTOR PENENTU PREFERENSI SEKOLAH NEGERI VS SWASTA

Katalog: 1205057

Nomor Publikasi: 07300.25015

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: 28 halaman

Penyusun Naskah: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Pembuat Kover: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penerbit: ©Badan Pusat Statistik

Pencetak: Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi: canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN CERITA DATA STATISTIK UNTUK INDONESIA

Volume 2, Nomor 7, 2025



MEMILIH MASA DEPAN: FAKTOR PENENTU PREFERENSI SEKOLAH NEGERI VS SWASTA

Pengarah

Muchammad Romzi

Penanggung Jawab

Muchammad Romzi

Reviewer

Wisnu Setiadi Nugroho

(Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada)

Ernawati Pasaribu

(Politeknik Statistika STIS)

Ganish Anggraeni

(Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS RI)

Penyunting

Usman Bustaman

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Dewi Krismawati

Valent Gigih Saputri

Zulfa Hidayah Satria Putri

Penata Letak

Ranu Yulianto



DISCLAIMER

CERDAS adalah artikel yang berfokus pada pemanfaatan sumber data alternatif dan statistik resmi untuk memberikan gagasan yang berkaitan dengan isu sosial ekonomi.

Pembaca dipersilakan mengutip artikel **CERDAS** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

Redaksi **CERDAS**

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR



Kepada para Sahabat Data yang budiman,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya atas selesainya buklet Cerita Data Statistik (CERDAS) Untuk Indonesia Edisi 2025.07. Buklet ini berisi artikel yang memanfaatkan sumber data inovatif dan statistik resmi untuk memberikan gagasan yang berkaitan dengan isu sosial ekonomi. Pada edisi kali ini, CERDAS Untuk Indonesia membahas tentang isu pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini mengulas pilihan orang tua antara sekolah negeri dan swasta berdasarkan data terbaru. Meski sekolah negeri masih menjadi pilihan utama, minat terhadap sekolah swasta terus tumbuh dalam satu dekade terakhir. Sebagian besar anak yang bersekolah berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah dan tinggal di wilayah perkotaan. Anak-anak di kota cenderung lebih banyak bersekolah di swasta dibandingkan mereka yang tinggal di desa. Faktor ekonomi menjadi penentu utama, keluarga yang lebih mampu memiliki peluang lebih besar untuk memilih sekolah swasta. Untuk menjaga keseimbangan dan kualitas pendidikan, pemerintah perlu memperkuat sekolah negeri, khususnya di desa dan jenjang dasar, serta memastikan sekolah swasta tetap terjangkau dan memenuhi standar kualitas.

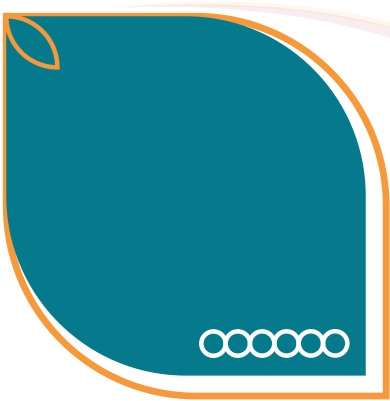
Buklet ini tidak sekadar sekumpulan angka, tetapi juga menggali esensi dari tiap-tiap nilai statistik. Ulasannya disampaikan dalam bentuk cerita data agar mudah dipahami dan menginspirasi kita untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Selamat membaca, menyelami, dan menemukan inspirasi.

Jakarta, Juli 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

Analia Adininggar Widyasanti





DAFTAR ISI

CERITA DATA STATISTIK UNTUK INDONESIA

Volume 2, Nomor 7, 2025

MEMILIH MASA DEPAN: FAKTOR PENENTU PREFERENSI SEKOLAH NEGERI VS SWASTA

Menelusik Pendidikan Pilihan	8.
Apakah Semua Anak Punya Kesempatan yang Sama? Kajian Sosial Ekonomi Anak Sekolah	12
Dibalik Keputusan Sekolah: Latar Sosial Ekonomi Kepala Rumah Tangga	16
Dinamika Pengeluaran untuk Sekolah Anak	19
Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap Preferensi Anak Bersekolah Negeri atau Swasta.	20
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	22
Referensi.	24

<https://www.bps.go.id>



IKHTISAR



- Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter individu dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua jenis status sekolah di Indonesia yang masing-masing mempunyai karakteristik kelembagaan dan pembiayaan yang berbeda, yakni negeri dan swasta.
- Artikel ini menganalisis faktor-faktor penentu preferensi orang tua berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dalam memilih antara sekolah negeri dan swasta di Indonesia berdasarkan data Susenas Maret 2024.
- Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan minat terhadap sekolah swasta, dengan jumlah sekolah swasta mengalami pertumbuhan konsisten di semua jenjang pendidikan sejak 2014–2024.
- Persentase anak yang bersekolah di sekolah negeri masih mendominasi yaitu sebesar 75,90 persen sementara 24,10 persen lainnya memilih sekolah swasta.
- Analisis sosial ekonomi mengungkap bahwa mayoritas anak yang bersekolah berasal dari kelompok ekonomi menuju kelas menengah sebesar 50,64 persen, dengan 59,91 persen tinggal di perkotaan.
- Faktor geografis menunjukkan perbedaan signifikan, anak yang bersekolah di swasta dan tinggal di perkotaan ada sebanyak 29,83 persen, sementara anak yang bersekolah di swasta dan tinggal di perdesaan hanya 17,15 persen.
- Analisis regresi logistik mengidentifikasi hierarki faktor penentu preferensi sekolah. Faktor ekonomi menjadi prediktor terkuat, dengan kelas ekonomi atas memiliki kemungkinan empat kali lebih besar ($OR = 4,0$) memilih sekolah swasta dibandingkan kelompok miskin.

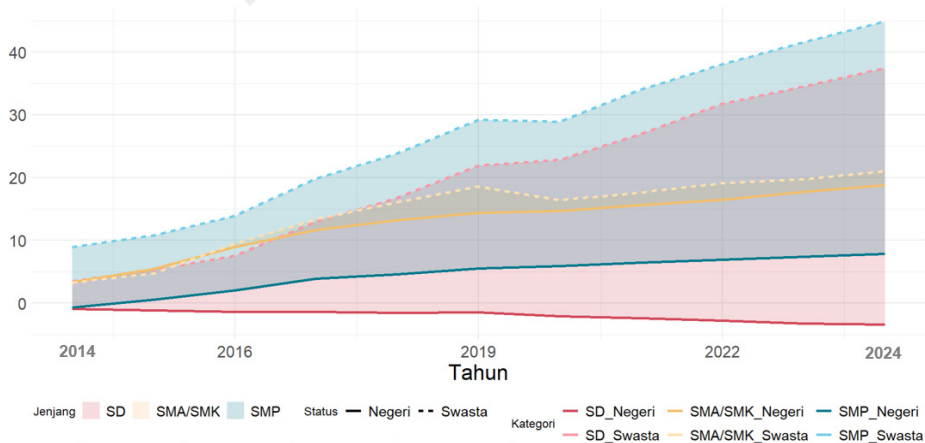
Menelisik Pendidikan Pilihan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berharga, melekat dalam kehidupan, dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Proses Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu hingga memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun manusia seutuhnya, dengan nilai moral, etika, serta cara berpikir yang membentuk kepribadian dan pandangan hidup. Hal ini sejalan dengan visi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat (Dewantara 1977). Oleh karena itu, keputusan untuk memilih pendidikan yang berkualitas sejak dini menjadi semakin penting mengingat dampaknya yang jangka panjang.

Investasi pada pendidikan berkualitas di usia dini bukan hanya membentuk karakter, tetapi juga mengoptimalkan potensi kognitif anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan anak, bahwa perkembangan kognitif anak usia dini sangat pesat dan fondasi pembelajaran

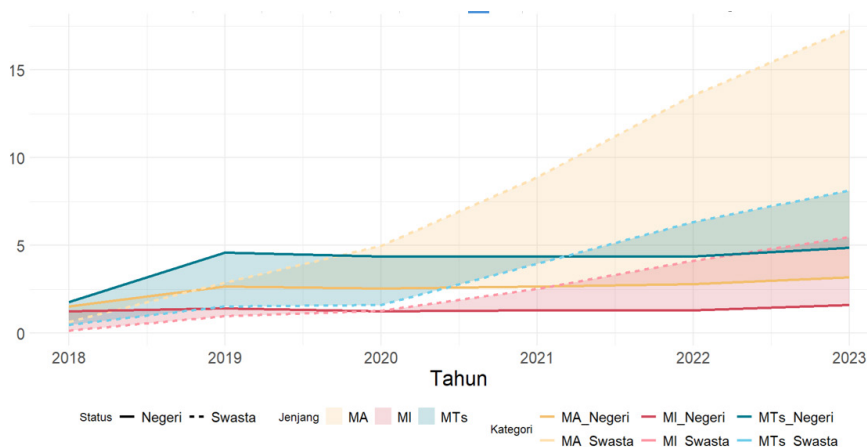
di masa depan diletakkan pada periode ini (Piaget 1964). Dengan demikian, lingkungan pendidikan yang tepat di usia dini akan sangat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan keberhasilan anak di masa depan. Pendidikan berkualitas tidak hanya menjamin penguasaan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial yang menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Secara umum, sistem pendidikan formal di Indonesia mengenal dua status kepemilikan sekolah, yaitu negeri dan swasta. Sekolah negeri dikelola oleh pemerintah, sedangkan sekolah swasta didirikan dan diselenggarakan oleh pihak non-pemerintah, seperti individu atau badan hukum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981. Berbeda dengan sekolah negeri yang dibiayai oleh negara, sekolah swasta beroperasi secara mandiri dengan pendanaan dari sektor swasta, seperti yayasan, donatur, atau orang tua siswa, sehingga biayanya memang cenderung lebih tinggi. Kemandirian ini memberikan karakteristik unik pada operasional dan pengembangan sekolah swasta. Fleksibilitas manajemen memungkinkan sekolah swasta menawarkan beragam pendekatan dan kurikulum, menjadi alternatif pilihan pendidikan bagi masyarakat.



Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Gambar 1 Pertumbuhan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah (dalam persen), 2014–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

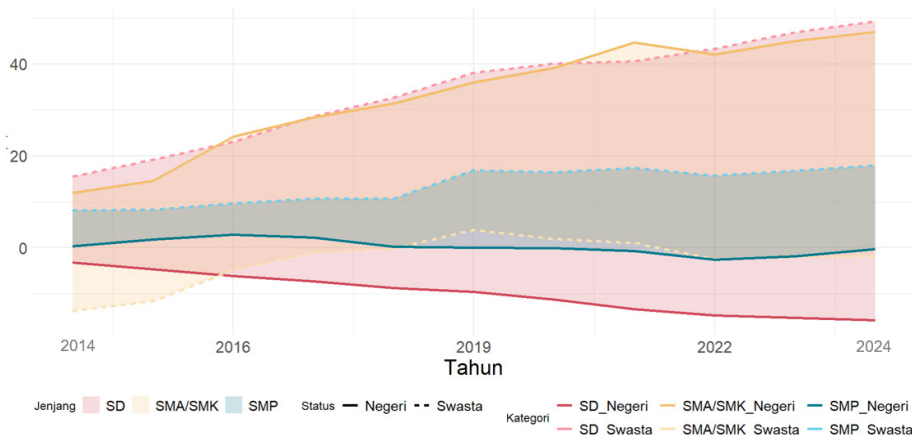
Gambar 2 Pertumbuhan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah (dalam persen), 2018–2023

Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan jumlah sekolah dan jumlah madrasah menurut jenjang pendidikan dan status sekolah (Negeri vs Swasta). Pada Gambar 1 memperlihatkan pertumbuhan sekolah untuk periode 2014–2024 dibandingkan dengan tahun 2013 menurut jenjang pendidikan dan status sekolah (Negeri vs Swasta). Tahun 2013 dipilih menjadi tahun dasar karena bertepatan dengan awal implementasi Kurikulum 2013. Namun, karena keterbatasan data, Gambar 2 untuk madrasah, hanya dapat memperlihatkan pertumbuhan madrasah untuk periode 2018–2023 dibandingkan dengan tahun 2017.

Berdasarkan Gambar 1, terdapat pertumbuhan jumlah SD Negeri bernilai negatif dari tahun 2014–2024 yang berarti jumlah SD Negeri yang mengalami penurunan atau terus berkurang sejak tahun 2014. Sebaliknya, jumlah SD Swasta justru meningkat signifikan dengan pertumbuhan positif hingga mencapai sekitar 37 persen pada 2024 dibandingkan 2013. Untuk jumlah SMP dan SMA/SMK, baik Negeri maupun swasta, sama-sama menunjukkan pertumbuhan positif walaupun terlihat bahwa peningkatan jumlah SMP dan SMA/SMK Negeri relatif lambat dan tidak secepat sekolah swasta. Beberapa faktor yang dapat

menjelaskan penurunan jumlah sekolah negeri di antaranya adalah adanya sekolah yang rusak, kebijakan penggabungan (*merger*) sekolah, dan faktor teknis lainnya. Kemudian, Gambar 2 juga menunjukkan hal yang selaras, dimana pertumbuhan jumlah sekolah Madrasah (MI, MTs, dan MA) yang lebih dominan pada sektor swasta, sementara sektor negeri tetap terlihat mengalami peningkatan jumlah sekolah namun relatif lambat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa mencerminkan respons pasar terhadap kebutuhan pendidikan bahwa pihak swasta lebih memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi.

Pada Gambar 3 pertumbuhan jumlah siswa yang bersekolah di sekolah negeri pada semua jenjang (SD, SMP, dan SMA-SMK) cenderung memiliki nilai negatif. Pada jenjang SMP dan SMA-SMK negeri, jumlah siswa cenderung stagnan bahkan menurun, sementara jumlah siswa swasta terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi paling mencolok terjadi pada jenjang SD negeri yang jumlah siswanya menurun secara signifikan, mencapai penurunan sekitar 15 persen pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun dasar 2013. Sebaliknya, jumlah siswa di sekolah swasta untuk semua jenjang terus bertambah dan pada jenjang SD, pertumbuhannya bahkan mencapai sekitar 50 persen atau



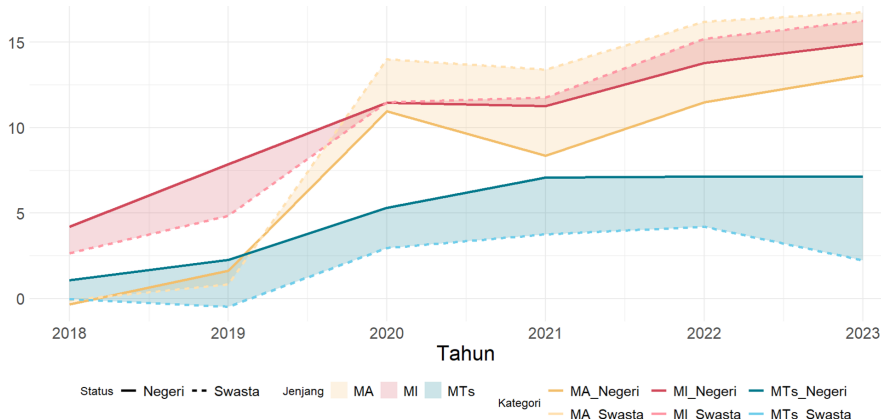
Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Gambar 3 Pertumbuhan Jumlah Siswa Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah (dalam persen), 2014–2024

1,5 kali lipat lebih banyak di tahun 2024 dibandingkan 2013. Kemudian, Gambar 4 yang menunjukkan tren jumlah siswa dalam pendidikan madrasah di Indonesia, meskipun kedua sektor (negeri dan swasta) mengalami pertumbuhan siswa, Madrasah Swasta (khususnya MI dan MA) memperlihatkan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada negeri.

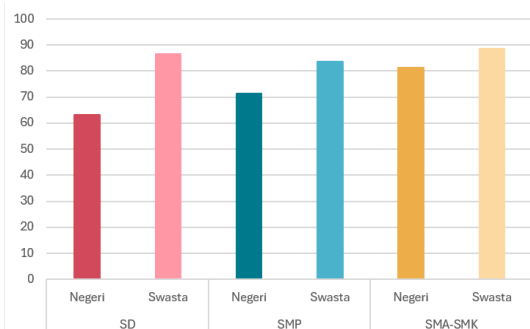
Pada dasarnya, fenomena pergeseran pilihan dari sekolah/madrasah negeri ke swasta didorong oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketersediaan kuota atau jumlah sekolah/madrasah negeri yang semakin terbatas pada jenjang pendidikan

yang lebih tinggi. Namun demikian, data secara keseluruhan juga mengindikasikan adanya tren pergeseran minat dan preferensi masyarakat dari sekolah/madrasah negeri menuju sekolah/madrasah swasta, terutama di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pergeseran preferensi ini dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan, ketersediaan fasilitas yang lebih baik, kurikulum yang lebih fleksibel, dan lingkungan belajar yang dianggap lebih kondusif di sekolah swasta. Di sisi lain, penurunan jumlah siswa SD Negeri juga bisa disebabkan oleh penurunan angka kelahiran atau penduduk daerah perkotaan yang cenderung memiliki pilihan sekolah swasta lebih banyak sesuai



Sumber: Kementerian Agama

Gambar 4 Pertumbuhan Jumlah Siswa Madrasah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah (dalam persen), dan 2018–2023

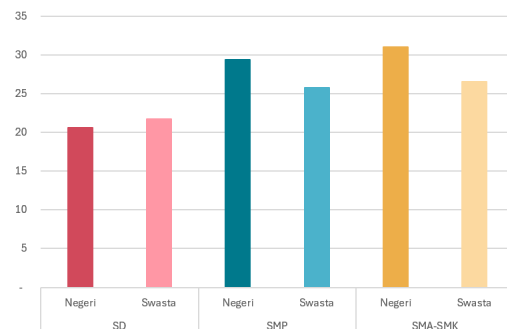


Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Gambar 5 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah (Negeri vs Swasta) dalam persen, 2024

dengan temuan Bank Dunia (2014) yang menyebutkan bahwa sekolah swasta lebih terkonsentrasi di wilayah urban. Jika tren ini terus berlanjut, maka pemerintah perlu mempertimbangkan strategi redistribusi sumber daya, serta penguatan mutu dan daya saing sekolah negeri agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Fenomena penurunan jumlah siswa SD Negeri dan pertumbuhan sekolah swasta dapat dikaitkan dengan kualitas infrastruktur dan layanan yang ditawarkan. Hal ini tercermin pada Gambar 5, yang menunjukkan bahwa Persentase Ruang Kelas Baik, sebagai salah satu indikator mutu prasarana pendidikan, lebih tinggi di sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri di semua jenjang, dengan kesenjangan paling tinggi terjadi pada jenjang SD. Sementara itu, Gambar 6 yang menampilkan Rasio Siswa per Rombongan Belajar, sebagai indikator kinerja pemerataan layanan Pendidikan, menunjukkan bahwa rasio tersebut lebih kecil di SMP dan SMA-SMK swasta, yang berarti jumlah siswa per rombongan belajarnya cenderung lebih sedikit dibandingkan di sekolah negeri sehingga lingkungan belajar yang mungkin lebih fokus di sekolah swasta. Adapun pada jenjang SD, rasio siswa-rombongan belajar antara negeri dan swasta terlihat hampir seimbang. Walaupun harus mengeluarkan



Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Gambar 6 Rasio Siswa-Rombongan Belajar Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah (Negeri vs Swasta) dalam persen, 2024

biaya yang lebih tinggi, gabungan faktor kualitas prasarana yang lebih baik dan potensi rasio siswa yang lebih rendah di sekolah swasta dapat semakin memperkuat argumen pilihan orang tua untuk lebih memilih sekolah swasta. Hal tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan, terutama dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah negeri di seluruh jenjang.

Tren preferensi masyarakat untuk memilih sekolah swasta tidak hanya merefleksikan orientasi terhadap kualitas pendidikan, tetapi juga mengindikasikan keterkaitannya dengan latar belakang sosial ekonomi rumah tangga. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga, yang mencerminkan kemampuan finansial, aspirasi orang tua terhadap kualitas dan lingkungan belajar, serta akses terhadap pilihan yang beragam, menjadi faktor penentu dalam keputusan ini. Latar belakang atau status sosial-ekonomi orang tua, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan orang tua, kemudian kepemilikan aset rumah tangga, serta ras atau etnis, mempengaruhi keputusan orang tua dalam memilihkan sekolah anaknya, terutama sekolah swasta. Selain itu, orang tua dengan jabatan pekerjaan yang tinggi cenderung lebih puas dengan pilihan sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah

negeri (Catsambis 1998; Rehman dkk. 2010). Fairlie (2006) juga mengemukakan hal yang seirama, yaitu faktor-faktor seperti ukuran rumah tangga, tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua juga dipertimbangkan dan berkontribusi pada keputusan pemilihan tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dari anak yang bersekolah di Indonesia dan faktor sosial ekonomi rumah tangga sebagai penentu preferensi anak bersekolah di sekolah negeri atau swasta. Pendekatan rumah tangga untuk merefleksikan keluarga atau orang tua siswa dilakukan karena adanya keterbatasan data penelitian, yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.

Apakah Semua Anak Punya Kesempatan yang Sama? Kajian Sosial Ekonomi Anak Sekolah

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak seharusnya dapat dirasakan oleh setiap anak. Namun, kenyataannya masih banyak perbedaan akses yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal anak sekolah. Tabel 1 memperlihatkan bahwa mayoritas anak bersekolah tinggal di daerah perkotaan (sekitar 60 persen). Studi di lingkungan perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa sekolah negeri sering dikaitkan dengan sumber daya yang bervariasi, khususnya di daerah perdesaan yang banyak menghadapi keterbatasan dana dan insentif pengajar. Hal ini konsisten dengan penelitian dari Zhao dan Zhang (2022), Fu dan Talib (2024) serta Chen, et al (2023) yang menyebutkan bahwa akses sekolah di perdesaan lebih sulit dan kualitas guru yang lebih rendah dibandingkan sekolah di daerah perkotaan sehingga muncul ketimpangan pendidikan.

Berdasarkan data Susenas tahun 2024, jenjang pendidikan dasar mencakup 77,59 persen dari seluruh anak yang

bersekolah, sedangkan jenjang pendidikan menengah berkisar 22,41 persen seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. Kondisi ini mencerminkan konsentrasi yang kuat pada pendidikan dasar, sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap pendidikan dasar sangat krusial terutama bagi anak (Zwieten, et al. 2020). Riset juga menekankan bahwa pendidikan pada usia awal kehidupan memiliki dampak jangka panjang pada hasil akademik, memperkuat pentingnya intervensi dini pada pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar yang dicakup pada penelitian ini meliputi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas (SMA)¹.

Tabel 1 Karakteristik Sosial Ekonomi Anak yang Bersekolah, 2024

Karakteristik	Persentase
(1)	(2)
Daerah Tempat Tinggal	
Perdesaan	40,09
Perkotaan	59,91
Status Sekolah	
Swasta	24,10
Negeri	75,90
Jenjang Pendidikan	
Dasar	77,59
Menengah	22,41
Kelompok Ekonomi	
Miskin	8,12
Rentan Miskin	24,42
Menuju Kelas Menengah	50,64
Kelas Menengah	16,52
Kelas Atas	0,30

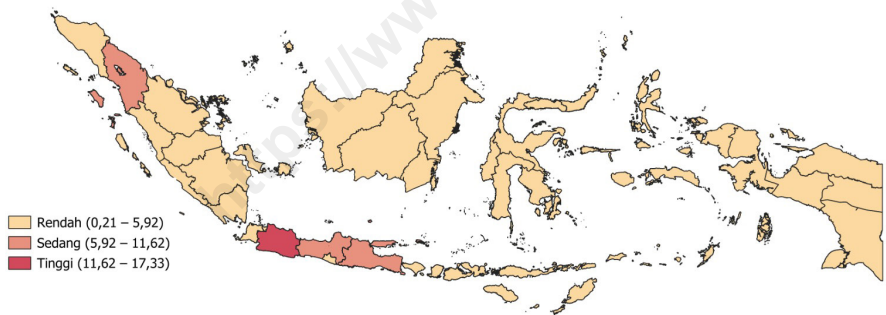
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

1 Jenjang pendidikan yang disebutkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

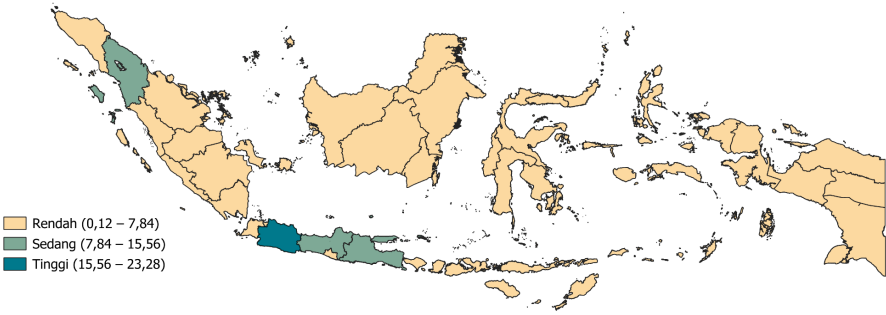
Berdasarkan distribusi kelompok ekonomi, ada sebesar 8,12 persen anak bersekolah yang berada dalam rumah tangga dengan kelompok miskin, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. Selanjutnya, pada kelompok rentan miskin lebih tinggi persentasenya dengan nilai mencapai 24,42 persen. Sementara itu, persentase anak bersekolah di kelompok ekonomi menuju kelas menengah menempati persentase terbesar dengan nilai 50,64 persen. Besarnya proporsi kelompok menuju kelas menengah ini menandakan adanya risiko ketidakstabilan sosial ekonomi yang bisa mempengaruhi pendidikan anak-anak seperti lebih besarnya peluang ketidakmampuan membayar biaya non-akademik di sekolah, lebih besarnya peluang untuk inkonsistensi dalam hal kemampuan membayar biaya pendidikan, dsb (Wang 2024).

Terlihat variasi distribusi antar provinsi dalam sebaran siswa di sekolah negeri (Gambar 7) dan sekolah swasta (Gambar 8).

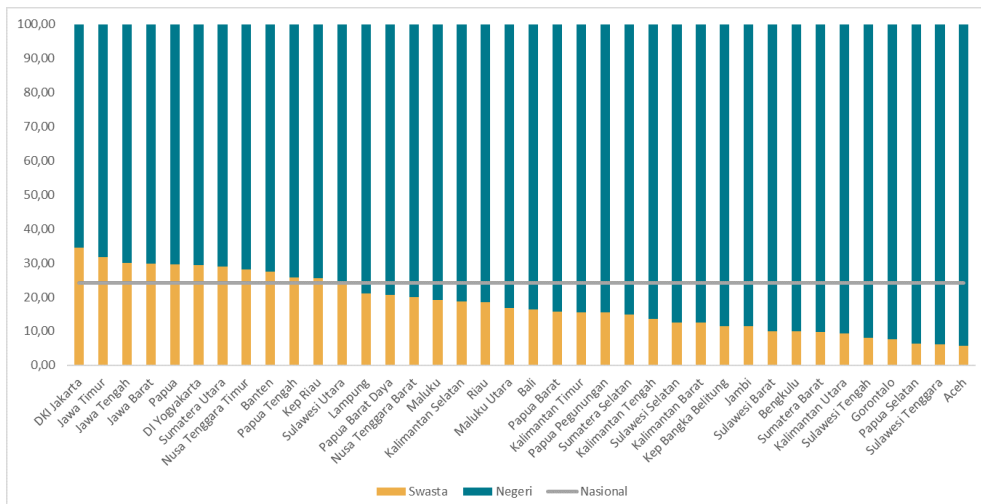
Provinsi dengan jumlah siswa swasta yang tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa preferensi orang tua terhadap sekolah swasta yang lebih dominan dibandingkan dengan preferensi ke sekolah negeri. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh persepsi kualitas, akses, atau nilai-nilai pendidikan yang ditawarkan. Penelitian dari Bedi dan Garg (2020) menemukan bahwa lulusan sekolah swasta seringkali memiliki kinerja lebih baik di pasar kerja dibandingkan lulusan negeri. Namun, penelitian Hendajany (2016) justru menunjukkan bahwa siswa di sekolah negeri lebih banyak yang berprestasi dibanding siswa yang bersekolah di swasta jika dilihat berdasarkan nilai ujian nasional. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa dominasi swasta di beberapa provinsi tidak secara otomatis mencerminkan kualitas yang lebih baik, melainkan juga refleksi kompleksitas pilihan orang tua: soal reputasi, akses, nilai-nilai agama atau privasi pendidikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah
Gambar 7 Persentase Sebaran Siswa pada Sekolah Negeri, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah
Gambar 8 Persentase Sebaran Siswa pada Sekolah Swasta, 2024



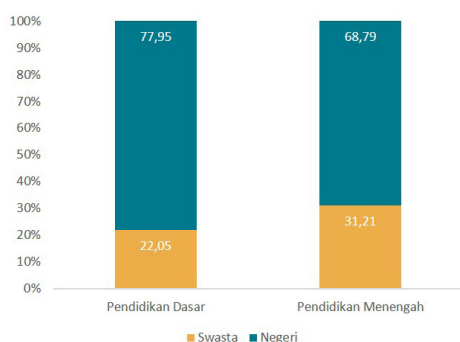
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 9 Proporsi Siswa Berdasarkan Status Sekolah Menurut Provinsi, 2024

Gambar 9 menggambarkan proporsi siswa pada masing-masing provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa secara nasional hanya sekitar 24,10 persen siswa bersekolah di sekolah swasta, dengan variasi antar provinsi dari 6 persen hingga sekitar 34 persen. Dominasi sekolah negeri tetap kuat. Meskipun demikian, di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur dan Papua Tengah terlihat preferensi lebih tinggi terhadap sekolah swasta dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tren sejalan dengan laporan Bank Dunia yang

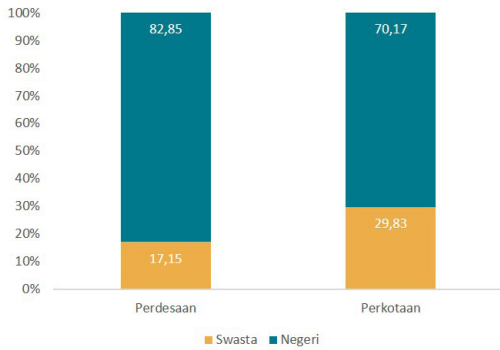
menegaskan masih mendominasinya sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar dan tren privatisasi yang meningkat di pendidikan menengah (World Bank 2014).

Sebagaimana terlihat pada Gambar 10, sekitar 22 persen siswa pendidikan dasar bersekolah di sekolah swasta. Sementara pada jenjang pendidikan menengah, proporsi anak di sekolah swasta meningkat menjadi 31,21 persen, menandai kecenderungan peningkatan partisipasi sektor swasta di jenjang yang lebih tinggi. Temuan ini konsisten dengan laporan Bank Dunia (2014), yang mencatat bahwa sekitar 87 persen siswa sekolah dasar (SD) bersekolah di negeri, namun angka tersebut menurun di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) seiring meningkatnya pilihan dan peran swasta dalam sistem pendidikan Indonesia (World Bank, 2014). Meskipun demikian, studi Hendajany (2016) menunjukkan bahwa secara akademik, siswa sekolah negeri cenderung memiliki hasil ujian nasional yang lebih tinggi dibanding siswa swasta pada tingkat SMP, menunjukkan bahwa dominasi negeri tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga performa. Data ini memperkuat bahwa meski partisipasi sekolah swasta meningkat



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 10 Persentase Anak yang Bersekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, 2024



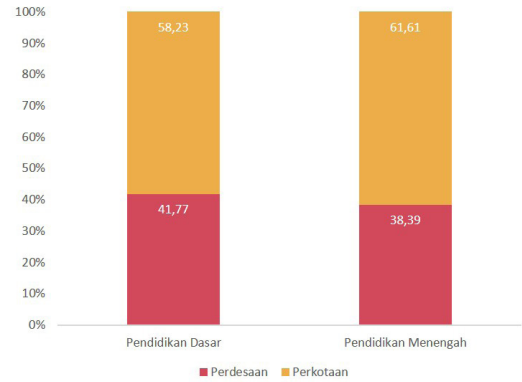
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 11 Persentase Anak yang Bersekolah Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal dan Status Sekolah, 2024

pada jenjang dasar-menengah, sektor negeri tetap menjadi pilar utama pendidikan dasar-menengah di Indonesia.

Gambar 11 menunjukkan bahwa persentase anak yang bersekolah di sekolah swasta lebih tinggi di wilayah perkotaan sebesar 29,83 persen dibandingkan dengan perdesaan sebesar 17,15 persen. Sebaliknya, persentase anak yang menempuh pendidikan di sekolah negeri lebih besar di perdesaan yaitu 82,85 persen dibandingkan di perkotaan sebesar 70,17 persen. Perbedaan ini mencerminkan keterbatasan ketersediaan sekolah swasta di wilayah perdesaan, sehingga sebagian besar anak hanya memiliki akses ke sekolah negeri. Di sisi lain, wilayah perkotaan menawarkan lebih banyak pilihan jenis sekolah, termasuk sekolah swasta yang umumnya menarik minat rumah tangga dengan status sosial ekonomi lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Bank Dunia (2014) yang menyebut bahwa sekolah swasta lebih terkonsentrasi di wilayah urban dan cenderung diakses oleh siswa dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 12, lebih dari separuh siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berasal dari wilayah perkotaan, masing-masing

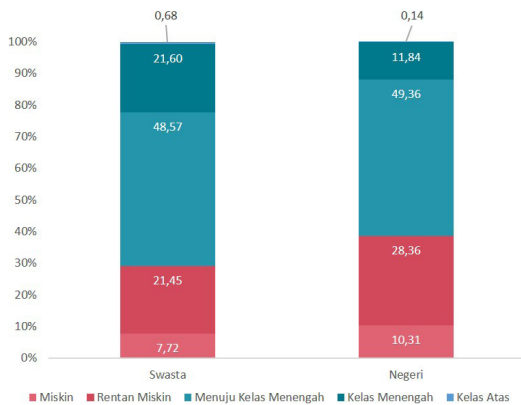


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 12 Persentase Anak yang Bersekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Wilayah Tempat Tinggal, 2024

sebesar 58,23 persen dan 61,61 persen, sementara sisanya tinggal di wilayah perdesaan. Distribusi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan cenderung lebih kuat di kota, terutama di jenjang yang lebih tinggi. Fenomena ini sejalan dengan laporan Bank Dunia (2014) yang menyoroti kesenjangan geografis dalam akses dan kualitas pendidikan. Anak-anak di perdesaan menghadapi keterbatasan infrastruktur, ketersediaan guru, dan pilihan sekolah. Hal ini juga konsisten dengan data sebelumnya yang menunjukkan dominasi sekolah negeri di perdesaan dan konsentrasi sekolah swasta di perkotaan yang memperkuat kesenjangan partisipasi pendidikan berdasarkan lokasi tempat tinggal, terutama saat anak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Kelompok menuju kelas menengah mendominasi jumlah siswa baik di sekolah swasta maupun negeri, masing-masing sebesar 48,57 persen dan 49,36 persen, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 13. Namun, persentase siswa dari kelompok menengah dan atas lebih dominan di sekolah swasta dengan persentase masing-masing kelompok sebesar 21,60 persen dan 0,68 persen. Hal tersebut mencerminkan



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 13 Persentase Anak yang Bersekolah Berdasarkan Kelas Ekonomi dan Status Sekolah, 2024

preferensi rumah tangga dengan daya beli yang lebih tinggi terhadap swasta. Sebaliknya, siswa dari kelompok miskin dan rentan miskin cenderung bersekolah di negeri. Fenomena ini konsisten dengan temuan Bank Dunia (2014) bahwa swasta lebih terakses oleh kelompok ekonomi menengah ke atas dan lebih terkonsentrasi di perkotaan, sementara sekolah negeri tetap menjadi tulang punggung pendidikan dasar-menengah di perdesaan. Studi Mas'ud, et al. (2025) menegaskan bahwa keterlibatan orang tua terutama yang berasal dari rumah tangga berstatus sosial ekonomi tinggi, akan lebih besar pengaruhnya dalam pendidikan anak di rumah. Akibatnya, preferensi sekolah didorong bukan hanya oleh ekonomi, tetapi juga kesiapan budaya dan lingkungan rumah. Tanpa dukungan budaya dan lingkungan rumah tangga yang memadai, akses ke sekolah swasta saja tidak cukup untuk mendorong mobilitas sosial. Justru, hal ini berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan antara kelompok yang siap secara sosial budaya dan yang tidak (Wang, 2024).

Dibalik Keputusan Sekolah: Latar Sosial Ekonomi Kepala Rumah Tangga

Tabel 2 Karakteristik Sosial Ekonomi Kepala Rumah Tangga pada Anak yang Bersekolah, 2024

Karakteristik	Persentase
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Perdesaan	5,57
Perkotaan	94,43
Pendidikan Terakhir	
Pendidikan Dasar	47,52
Pendidikan Menengah	35,70
Pendidikan Tinggi	9,58
Tidak Pernah Sekolah	7,20
Status Perkawinan	
Belum Kawin	~0
Cerai Hidup	2,02
Cerai Mati	4,31
Kawin	93,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagian besar kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 94 persen. Tingginya proporsi kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki mencerminkan struktur rumah tangga di Indonesia yang umumnya masih menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dalam kondisi ini, peran dan kontribusi ibu, terutama dalam hal pendidikan anak, tidak selalu terlihat secara formal dalam status kepala rumah tangga. Padahal, berbagai penelitian menegaskan bahwa pendidikan ibu berpengaruh lebih kuat terhadap prestasi akademik anak terutama dalam bidang matematika dan literasi dibandingkan pendidikan ayah. Sebagai contoh, sebuah studi oleh Yu (2023) menemukan bahwa ibu berpendidikan tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas kognitif dan akademik anak yang

meliputi aspek literasi, kemampuan adaptasi, dan kesehatan psikis anak. Dengan kata lain, rendahnya pendidikan ibu dapat menghambat terciptanya lingkungan belajar yang optimal di rumah. Oleh karena itu, meskipun kepala rumah tangga secara formal berstatus laki-laki, kurangnya modal budaya dari ibu dapat memperlemah dukungan pendidikan di rumah dan memperburuk kesenjangan, khususnya di rumah tangga kelas menengah yang tidak disertai sumber daya kultural.

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas kepala rumah tangga berstatus menikah yaitu sebanyak 93,67 persen, sementara yang bercerai (hidup atau cerai mati) total mencapai 6,33 persen. Studi Azzah Fadhilah & Jasmina (2023) mengonfirmasi bahwa perceraian orang tua berkaitan negatif dengan capaian pendidikan anak. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan ekstra bagi anak dari rumah tangga tidak utuh. Kehadiran kedua orang tua secara stabil meningkatkan kesempatan belajar anak baik dari sisi emosional maupun kultural yang sejalan dengan konsep modal sosial (*social capital*) bahwa keterlibatan rumah tangga dan komunitas mendukung keberhasilan pendidikan.

Dari sisi pendidikan kepala rumah tangga, hampir 83 persen hanya berada pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Hal tersebut berimplikasi pada modal sosial dan budaya di rumah. Penelitian Mas'ud et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua terutama ibu sangat mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam pendidikan di lingkungan rumah, sementara peran di sekolah relatif konstan. Selain itu, studi Nawas (2020, PISA) menemukan bahwa anak dari orang tua berpendidikan tinggi cenderung memiliki performa membaca yang lebih baik. Dengan kata lain, faktor pendidikan orang tua terbukti lebih berpengaruh daripada kekayaan ekonomi rumah tangga. Anak dari rumah tangga kelas menengah baru berisiko mengalami gangguan dalam proses pendidikan apabila tidak didukung oleh lingkungan rumah yang memiliki budaya belajar yang kuat, meskipun mereka memiliki akses yang lebih besar ke sekolah swasta.

Sumber:

Dilihat berdasarkan usia kepala rumah tangga (KRT) yang mempunyai anak dengan status masih bersekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kelompok usia antara 35 hingga 49 tahun paling banyak mendominasi,

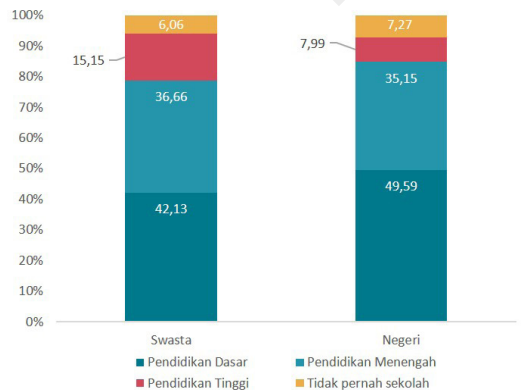


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 14 Persentase Usia KRT dan Status Sekolah Anak, 2024

masing-masing kelompok persentasenya berada pada rentang 19–23 persen, hal ini terlihat pada Gambar 14. Fenomena ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa usia orang tua saat melahirkan berpengaruh terhadap hasil pendidikan anak, dalam penelitian ini usia orang tua berkorelasi dengan usia KRT. Studi dari Currie & Moretti (2003) menemukan bahwa anak dari orang tua yang memiliki anak pada usia lebih matang (30–40 tahun) memiliki peluang lebih tinggi untuk menyelesaikan minimal jenjang pendidikan menengah. Dampak positif ini terutama terlihat pada rumah tangga dari kelompok sosial ekonomi rendah hingga menengah. Selain itu, laporan OECD (2012) menegaskan bahwa orang tua usia produktif lebih terlibat secara aktif dalam proses pendidikan anak, dan keterlibatan ini berdampak langsung pada prestasi akademik.

Sebagian besar anak yang bersekolah, baik di sekolah swasta maupun negeri, berasal dari kepala rumah tangga (KRT) yang berpendidikan maksimal tingkat menengah, sebagaimana terlihat pada Gambar 15. Namun, anak dari KRT berpendidikan tinggi lebih banyak bersekolah di sekolah swasta dibanding di negeri. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan pilihan sekolah. Temuan ini

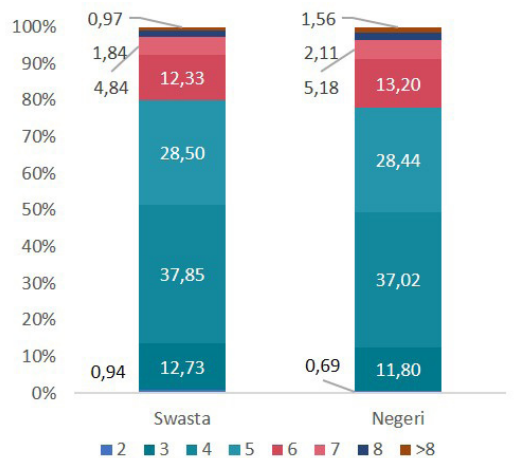


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 15 Persentase Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga dan Status Sekolah Anak, 2024

konsisten dengan studi OECD (2022) yang menyatakan bahwa orang tua berpendidikan tinggi lebih mungkin memilih dan mendukung pendidikan berkualitas karena memiliki informasi, aspirasi, dan sumber daya lebih besar, sehingga mempunyai kecenderungan memasukkan anak di sekolah swasta yang dianggap memenuhi kriteria tersebut (OECD 2022). Selain itu, pendidikan orang tua, terutama ibu, berpengaruh signifikan terhadap capaian belajar anak dan keputusan-keputusan terkait sekolah (UNESCO 2020). Dengan demikian, tingkat pendidikan orang tua berperan penting dalam mendorong keberhasilan pendidikan anak, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Mayoritas anak yang bersekolah, baik di sekolah swasta maupun negeri, berasal dari rumah tangga dengan anggota sebanyak 4 hingga 5 orang, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 16. Temuan ini sejalan dengan studi-studi yang menunjukkan bahwa ukuran rumah tangga mempengaruhi hasil pendidikan anak. Dalam rumah tangga yang jumlah anggotanya banyak, sumber daya yang tersedia seperti waktu, perhatian orang tua, dan pengeluaran pendidikan harus dibagi lebih banyak, sehingga setiap anak cenderung



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 16 Persentase Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Status Sekolah Anak, 2024

menerima dukungan yang lebih sedikit. Penelitian oleh Black, Devereux, & Salvanes (2005) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah saudara, semakin rendah kemungkinan seorang anak menyelesaikan pendidikan tinggi. Kondisi ini relevan dengan studi Maralani (2008) yang menunjukkan bahwa dalam konteks urban Indonesia, rumah tangga dengan anggota rumah tangga banyak memiliki dampak negatif terhadap capaian pendidikan anak pada generasi terbaru. Selain itu, setiap tambahan anak mengurangi kemungkinan anak mencapai pendidikan menengah. Hal ini menegaskan bahwa usia KRT dan jumlah anggota rumah tangga terutama pada usia produktif (>35 tahun) dengan rumah tangga besar mempengaruhi kualitas pendidikan anak.

Dinamika Pengeluaran untuk Sekolah Anak

Tabel 3 Proporsi Biaya Pendidikan Terhadap Total Pengeluaran Rumah Tangga Selama Setahun, 2024

Kelas Ekonomi	Rata-rata	Maksimal
(1)	(2)	(3)
Miskin	3,96	28,38
Rentan Miskin	3,62	45,03
Menuju Kelas Menengah	4,28	67,42
Kelas Menengah	6,66	64,60
Atas	6,87	37,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Setiap orang tua pasti berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, terlepas dari bagaimana latar belakang ekonominya. Namun, di balik semangat tersebut, terdapat realitas yang tidak bisa diabaikan: biaya pendidikan tidaklah kecil. Data pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak pada Tabel 3 di atas mencakup berbagai komponen, mulai dari sumbangan pembangunan sekolah

(uang pangkal), uang sekolah dan komite, hingga iuran kegiatan ekstrakurikuler, buku pelajaran, alat tulis, dan biaya kursus di luar sekolah. Jika dikumpulkan dalam setahun, jumlahnya bisa sangat beragam dan hal tersebut tergantung pada pilihan sekolah serta kemampuan ekonomi rumah tangga. Dari sinilah bisa dilihat bagaimana kelas ekonomi memengaruhi keputusan dan daya beli orang tua dalam membiayai pendidikan anak.

Berdasarkan data proporsi biaya pendidikan terhadap total pengeluaran rumah tangga selama setahun (Tabel 3), terlihat adanya variasi yang cukup signifikan antar kelompok kelas ekonomi. Rumah tangga dari kelas ekonomi miskin dan rentan miskin rata-rata mengalokasikan sekitar 3,96 persen dan 3,62 persen dari total pengeluaran tahunannya untuk biaya pendidikan. Meskipun secara nominal angkanya tergolong kecil, bagi kelompok miskin proporsi ini bisa sangat membebani, terutama karena kebutuhan dasar lain seperti pangan dan tempat tinggal cenderung lebih mendesak. Menariknya, kelompok rentan miskin memiliki nilai maksimal proporsi biaya pendidikan yang lebih tinggi (sebesar 45,03 persen) jika dibandingkan dengan kelompok miskin. Hal ini bisa jadi mencerminkan adanya pengorbanan konsumsi kebutuhan lain demi pendidikan.

Sementara itu, kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah menunjukkan pola yang menarik. Rata-rata proporsi biaya pendidikan kedua kelompok tersebut masing-masing mencapai 4,28 persen dan 6,66 persen. Bahkan, kedua kelompok tersebut memiliki nilai proporsi maksimal yang jauh lebih tinggi dibanding seluruh kelompok, masing-masing sebesar 67,42 persen dan 64,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dalam kedua kelompok tersebut cenderung mengalokasikan proporsi yang cukup besar untuk pendidikan, bahkan

mungkin melebihi kemampuannya secara ekonomis. Mereka tampaknya menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama untuk mobilitas sosial, meskipun dengan risiko beban pengeluaran yang tidak seimbang. Namun di sisi lain, tingginya nilai maksimum ini juga bisa menandakan adanya tekanan biaya pendidikan yang besar bagi sebagian rumah tangga dalam kelompok ini, sehingga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Adapun pada kelompok kelas atas, rata-rata proporsi biaya pendidikan lebih tinggi dibandingkan kelas ekonomi yang lain, yaitu sebesar 6,87 persen. Meskipun secara persentase lebih tinggi, kelompok ini cenderung memiliki kapasitas finansial yang lebih baik, sehingga beban relatifnya terhadap kesejahteraan rumah tangga tidak seberat kelompok di bawahnya. Selain itu, nilai maksimum proporsi biaya pendidikan pada kelompok ini justru lebih rendah daripada kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran mereka untuk pendidikan lebih merata dan cenderung stabil. Temuan ini memperkuat pentingnya perhatian pada kelompok menuju kelas menengah serta kelas menengah sebagai kelompok transisi yang rawan tergelincir dalam ketidakstabilan ekonomi akibat tekanan biaya pendidikan yang relatif tinggi. Kebijakan subsidi pendidikan atau dukungan biaya pendidikan berskala progresif sangat relevan untuk kelompok ini agar mereka tidak kehilangan momentum menuju mobilitas sosial yang lebih baik.

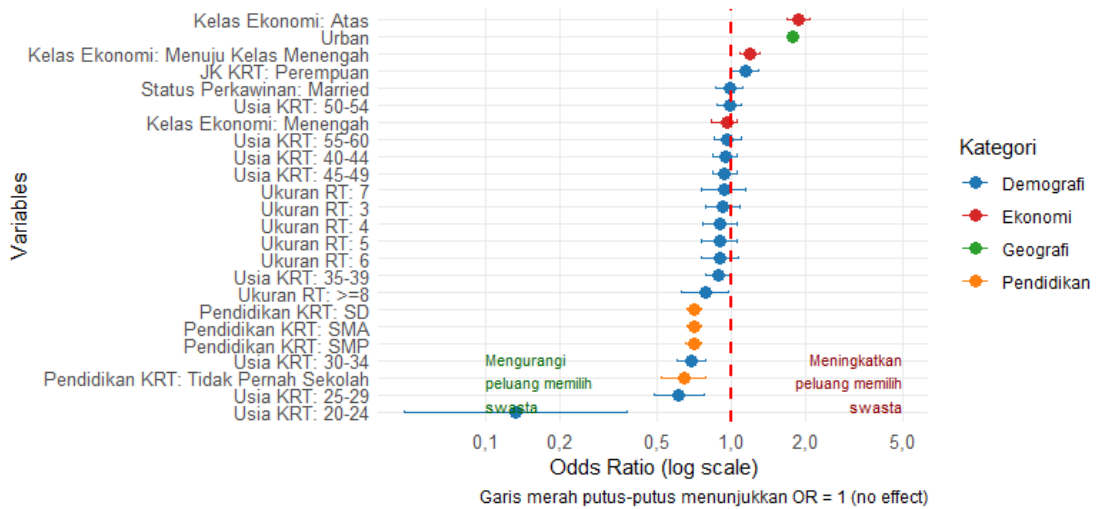
Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap Preferensi Anak Bersekolah Negeri atau Swasta

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk mengungkap hierarki pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap

preferensi anak bersekolah di sekolah negeri atau swasta. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi mendominasi sebagai prediktor terkuat. Kelas ekonomi atas menunjukkan *Odds Ratio* (OR) tertinggi sebesar 4,0, yang berarti kelompok ini memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk memilih sekolah swasta dibandingkan kelompok referensi (kelas miskin). Kelas ekonomi menengah (OR = 2,1) dan menuju menengah (OR = 1,6) juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, mengonfirmasi bahwa kelas ekonomi rumah tangga merupakan determinan utama terhadap preferensi memilih pendidikan swasta.

Faktor geografis memiliki pengaruh moderat namun konsisten. Rumah tangga yang tinggal di perkotaan (OR = 1,2) menunjukkan pengaruh positif terhadap preferensi anak bersekolah di sekolah swasta. Faktor demografis seperti Kepala rumah tangga perempuan (OR = 1,1) menunjukkan kecenderungan sedikit lebih tinggi memilih swasta, kemungkinan terkait dengan prioritas keamanan dan lingkungan sekolah yang lebih terkontrol (Perwita & Widuri 2023). Jumlah ukuran rumah tangga (baik 2 sampai lebih dari 8 anggota rumah tangga) menunjukkan odds ratio mendekati 1, mengindikasikan bahwa ukuran rumah tangga yang besar tidak memiliki pengaruh signifikan. Rumah tangga dengan usia kepala rumah tangga 20–24 tahun memiliki odds ratio 0,13 yang menunjukkan bahwa rumah tangga cenderung untuk tidak memilih sekolah swasta.

Faktor pendidikan kepala rumah tangga menunjukkan pola yang menarik. Semua tingkat pendidikan formal (SD, SMP, SMA) memiliki *odds ratio* berkisar 0,7–0,8, yang artinya kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan formal (SD, SMP, atau SMA) cenderung tidak memilih sekolah swasta.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

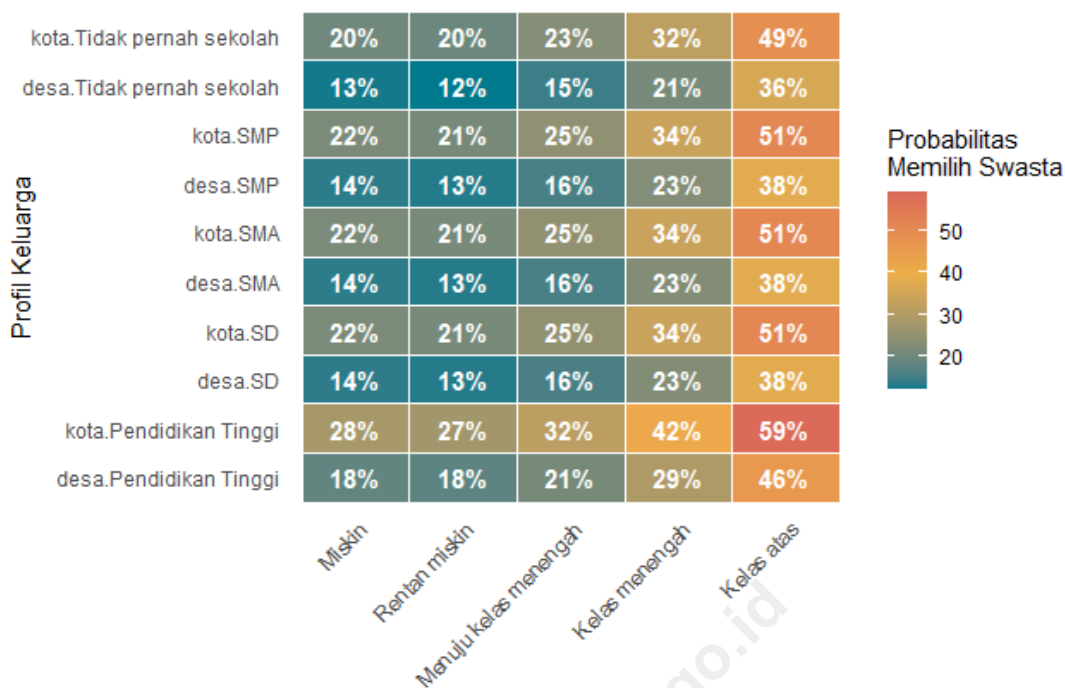
Gambar 17 Forest Plot untuk Odds Ratios Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Sekolah Swasta, 2024

Secara keseluruhan, Gambar 17 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor paling utama yang menentukan pilihan sekolah swasta. Semakin banyak uang, semakin besar kemungkinan memilih sekolah swasta. Sementara pendidikan kepala rumah tangga berperan justru sebagai faktor yang membuat mereka cenderung tidak memilih sekolah swasta, melainkan sekolah negeri. Sedangkan variabel demografis serta geografis memiliki pengaruh yang lebih moderat.

Sementara itu hasil penghitungan probabilitas terhadap model regresi logistik berdasarkan kombinasi faktor sosial ekonomi menunjukkan pola yang sangat jelas bahwa probabilitas memilih swasta meningkat secara konsisten seiring dengan peningkatan tingkat ekonomi rumah tangga, dengan efek yang diperkuat oleh faktor geografis perkotaan dan perdesaan. Pada kelompok kelas miskin, perbedaan pendidikan tidak terlalu signifikan dalam memengaruhi pilihan sektor pendidikan, dengan probabilitas memilih swasta berkisar antara 5-18 persen. Namun, ketika status ekonomi meningkat ke kelas menuju menengah, mulai terlihat diferensiasi yang lebih jelas berdasarkan

tingkat pendidikan orang tua, di mana rumah tangga dengan pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi memiliki probabilitas 28 persen memilih swasta dibandingkan hanya 8 persen untuk yang berpendidikan SD/SMP.

Pola yang paling mencolok terlihat pada kelompok kelas menengah dan kelas atas, di mana gap antara tingkat pendidikan menjadi semakin lebar. Pada kelas menengah, rumah tangga dengan KRT yang berpendidikan Perguruan Tinggi atau SMA serta tinggal di perkotaan memiliki probabilitas 45 persen memilih swasta, sementara perdesaan SD/SMP hanya 18 persen. Gap ini mencapai puncaknya pada kelas atas, di mana probabilitas memilih swasta untuk rumah tangga yang tinggal di perkotaan dan tingkat pendidikan KRT Perguruan Tinggi/SMA mencapai hampir 60 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan perdesaan SD/SMP yang hanya 35 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi status ekonomi tinggi dan pendidikan tinggi menciptakan preferensi yang kuat terhadap pendidikan swasta. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 18.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 18 *Predicted Probability Plot* Probabilitas Memilih Sekolah Swasta Berdasarkan Kombinasi Faktor Sosial Ekonomi

Model ini juga mengungkap adanya efek interaksi antara lokasi geografis (perkotaan vs perdesaan) dan tingkat pendidikan dalam memengaruhi pilihan pendidikan. Secara konsisten, rumah tangga yang tinggal di perkotaan dengan pendidikan tinggi menunjukkan probabilitas tertinggi memilih swasta di setiap tingkat ekonomi, sementara rumah tangga yang tinggal di perdesaan dengan pendidikan rendah menunjukkan probabilitas terendah. Gradasi atau perubahan warna yang semakin intens dari biru ke merah menggambarkan transisi probabilitas yang *smooth*, menunjukkan bahwa model berhasil menangkap hubungan *non-linear* antara karakteristik sosiodemografi dan pilihan pendidikan sekolah swasta atau negeri.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki dua jalur sekolah formal, yaitu negeri dan swasta. Sekolah negeri dijalankan oleh pemerintah, sementara sekolah swasta didirikan oleh pihak di luar pemerintah seperti individu atau organisasi, yang keberadaannya diatur oleh peraturan pemerintah. Data sejak 2014 menunjukkan bahwa peminat SD Negeri terus menurun setiap tahun. Sebaliknya, jumlah siswa di sekolah swasta (SD, SMP, dan SMA/SMK) justru terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan tren dalam pilihan sekolah. Pilihan masyarakat Indonesia antara sekolah negeri dan swasta tidak hanya menunjukkan keinginan akan kualitas pendidikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Faktor ekonomi rumah tangga terbukti menjadi determinan utama, dengan kelompok kelas menengah ke atas menunjukkan preferensi yang kuat terhadap pendidikan swasta. Pola ini diperkuat oleh keunggulan sekolah swasta dalam hal kualitas infrastruktur dan rasio rombongan belajar siswa yang lebih ideal, terutama di wilayah perkotaan. Namun, dominasi sekolah negeri yang masih mencapai 75,90 persen menunjukkan bahwa sektor publik tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional, khususnya bagi rumah tangga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat perdesaan.

Berdasarkan kajian dalam artikel ini, pemerintah perlu mengembangkan strategi kebijakan yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan dan kualitas kedua sektor pendidikan. Prioritas utama adalah peningkatan daya saing dan kualitas sekolah negeri melalui tata kelola dan akuntabilitas, terutama di jenjang pendidikan dasar dan wilayah perdesaan, untuk mengurangi kesenjangan kualitas dengan sekolah swasta. Selain itu, diperlukan kebijakan pengoptimalan rasio siswa per kelas di sekolah negeri agar proses pembelajaran lebih optimal dan efektif. Dengan pendekatan holistik ini, sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang secara berimbang, memberikan pilihan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat tanpa memperdalam kesenjangan sosial ekonomi.

Referensi

- Bedi, A.S., & Garg, A., 2000. "The effectiveness of private versus public schools: the case of Indonesia". *Journal of Development Economics*, Volume 61, Issue 2, Hal 463-494, [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(00\)00065-1](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(00)00065-1).
- Black, S.E., Devereux, P.J., & Salvanes, K.G. 2005. "The More The Merrier? The Effect Of Family Size And Birth Order On Children's Education". *Quarterly Journal of Economics*, v120(2,May), 669-700. <https://doi.org/10.3386/w10720>.
- Catsambis S. (1998), *Expanding Knowledge of Parental Involvement In Secondary Education: Effects On High School Academic Success*, Queens College.
- Chen, Y., et al. 2023. "How Rural-Urban Disparities in Teacher Allocation Affect Student Achievement". *International Journal of Educational Development*.
- Currie, J. & Moretti, E. 2003. "Mother's Education And The Intergenerational Transmission Of Human Capital: Evidence From College Openings". *The Quarterly Journal of Economics* Vol 118 Hal 1495-1532. <https://doi.org/10.1162/003355303322552856>.
- Dewantara, Ki Hajar (1977). "Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Fadhilah, A.R. & Jasmina, T. 2023. "Parental Marital Status and Children Education Performance: The Case in Indonesia". *Economics and Finance in Indonesia: Vol. 68: No. 2, Article 3*.
- Fu, W., & Talib, Abdul. 2024. "Research on The Relationship between Urban and Rural Educational Resources Allocation and Educational Equity". *International Education Forum* Vol 2 Issue 8 Hal. 39-45.
- Hendajany, Nenny. 2016. "The Effectiveness of Public vs Private Schools in Indonesia". *Journal of Indonesian Applied Economics* vol 6 hal. 66-89. [10.21776/ub.jiae.2016.006.01.4](https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.006.01.4).
- Maralani, V. 2008. "The Changing Relationship Between Family Size and Educational Attainment Over the Course of Socioeconomic Development: Evidence from Indonesia." *Demography* 45 (3): 693-717. <https://doi.org/10.1353/dem.0.0013>.
- Mas'ud, B., et al. 2025. "The Impact of Family Socioeconomic Status on Parental Involvement in Children's Education: Differences between High- and Low-SES Families in Indonesia". *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, Hal 336-356. <https://doi.org/10.12928/jehcpvi.30771>.
- Nawas, A. 2019. "The Influence of Family Wealth and Parent Education Level on Students' Reading Literacy". *Journal of Indonesian Social Science and Humanities* Vol 9 Hal 81-90 <https://doi.org/10.14203/jisshv9i1.116>.
- OECD. 2012. "Let's Read Them a Story! The Parent Factor in Education". PISA OECD Publishing: Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264176232-en>.
- OECD. 2022. "Education at a Glance 2022: OECD Indicators". OECD Publishing: Paris, <https://doi.org/10.1787/3197152b-en>.
- Perwita, D., & Widuri, R. (2023). Telaah pendidikan: preferensi orang tua memilih sekolah swasta daripada sekolah negeri. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 11(1), 64-75.
- Piaget, J. (1964). Part I: Cognitive development in children. *Journal of Research in Science Teaching*, 2(3), 176-186.
- Rehman N. U, Khan, G, Triq, M. dan Tasleem, S. (2010), *Determinants of Parents' Choice in Selection of Private Schools for their Children in District Peshawar of Khyber Pakhtunkhwa Province*. Vol.44 No.1, pp.140-151.
- UNESCO. 2020. "Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all". UNESCO: Paris, <https://doi.org/10.18356/2ddb782c-en>.
- Wang, N. 2024. "The Urban-Rural Heterogeneous Effect of Family SES on Achievement: The Mediating Role of Culture". *Behav Sci*. Vol 14, 84. <https://doi.org/10.3390/bs14020084>.

- World Bank. "World Bank and Education in Indonesia." Diakses 20 Juni 2025. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia>.
- Yu, S. 2023. "The Influence of Mothers' Educational Level on Children's Comprehensive Quality". *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 8, 1264-1272. <https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4461>.
- Zhao, Q., & Zhang, M. 2022. "Inequality in Education between Rural and Urban Areas: Evidence from Developing Countries". *Education and Urban Society*
- Zwieten, et al. 2021. "Socioeconomic Status During Childhood and Academic Achievement in Secondary School". *Acad Pediatr*. Vol 21(5):838-848 doi: 10.1016/j.acap.2020.10.013.

<https://www.bps.go.id>



**SENSUS
EKONOMI
2026**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id>, E-mail: bpshq@bps.go.id